

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYERTAAN TES MASUK PEGAWAI NEGERI DENGAN SISTEM ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor : 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Oleh

Andi Septian

Tes masuk Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) adalah salah satu tahapan penting dalam proses rekrutmen pegawai negeri sipil di Indonesia. Dewasa ini terdapat kasus dimana pelaku tindak pidana penyertaan dalam tes masuk pegawai negeri dengan sistem elektronik terlibat dalam perbuatan yang merugikan integritas dan kredibilitas proses rekrutmen pegawai negeri sipil. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait dengan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri dengan sistem elektronik berdasarkan Putusan Nomor: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, serta apakah yang menjadi faktor penghambat putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penyertaan tes masuk Pegawai Negeri yang melibatkan sistem elektronik berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data tersebut diperoleh serta dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa hakim mempertimbangkan aspek yuridis, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, peraturan perundang-undangan hukum pidana, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Selain itu, terdapat pertimbangan dari aspek non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa dan akibat perbuatan terdakwa. Hambatan-hambatan dalam putusan hakim meliputi kekosongan atau keterbatasan regulasi, kesulitan dalam pembuktian hukum, perbedaan interpretasi dalam menentukan unsur tindak pidana, aspek hak asasi dan peradilan yang berkeadilan, kurangnya keahlian teknis aparat penegak hukum, ketidaktegasan dalam penerapan sanksi, proses peradilan yang terlalu panjang dan

Andi Septian

rumit, kurangnya infrastruktur dilembaga peradilan dan terbatasnya akses terhadap tenaga ahli forensik digital, kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan juga kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan, normalisasi nepotisme dan suap dalam seleksi tes masuk pegawai negeri serta kurangnya kesadaran akan etika dan integrasi.

Saran dalam penelitian ini adalah hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun harus lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan dampak putusan terhadap masyarakat dalam menjatuhkan hukuman. Putusan yang terlalu ringan dapat melemahkan efek jera bagi terdakwa dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dan pemerintah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam meningkatkan sumber daya manusia yang lebih efektif dan efisien dibidang teknologi khususnya ahli forensik digital yang memadai untuk mengidentifikasi bukti elektronik secara akurat.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana Penyertaan, Tes CASN.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S DECISION ON THE PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS INCLUDING THE CIVIL SERVANT ENTRANCE TEST WITH ELECTRONIC SYSTEM

(Study Decision Number: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

By

Andi Septian

The State Civil Apparatus Candidate Entrance Test (CASN) is one of the important stages in the recruitment process for civil servants in Indonesia. Nowadays there are cases where perpetrators of criminal acts of participation in civil servant entrance tests with electronic systems are involved in acts that are detrimental to the integrity and credibility of the civil servant recruitment process. The problems studied in this study are related to how the judge considers the verdict against the perpetrator of the criminal act of including the Civil Servant entrance test with an electronic system based on Decision Number: 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, and what is the factor inhibiting the judge's decision against the perpetrator of the crime of participating in the Civil Servant entrance test involving an electronic system based on the case study of Decision Number 702/Pid.Sus/2022/PN.Tjk.

The approach in this study uses normative juridical approaches and empirical juridical approaches. The sources and types of data used are primary data and secondary data. The resource persons for this study were the Judge of the Tanjung Karang District Court Class IA; and Lecturer of the Criminal Law Section, Faculty of Law, University of Lampung. The data collection method was carried out by literature study and field study. Then the data is obtained and analyzed qualitatively.

Based on the results of the research and discussion, the judge considered the juridical aspects, such as the public prosecutor's indictment, the public prosecutor's demands, the defendant's statement, witness statements, evidence, criminal law laws and regulations, as well as aggravating and mitigating matters. In addition, there are considerations from non-juridical aspects, such as the defendant's background and the consequences of the defendant's actions. Obstacles in the judge's decision include the absence or limitation of regulations, difficulties in proving the law, differences in interpretation in determining the elements of criminal acts, aspects of human rights and fair justice, lack of technical expertise

Andi Septian

of law enforcement officials, indecisiveness in the application of sanctions, judicial processes that are too long and complex, lack of infrastructure in judicial institutions and limited access to digital forensic experts, lack of public legal awareness and also lack of trust in the judicial system, normalization of nepotism and bribery in the selection of civil servant entrance tests and lack of awareness of ethics and integration.

The suggestion in this study is that the judge in sentencing defendants who commit criminal acts deliberately and without the right to access other people's computers or electronic systems in any way should consider the aspects of justice and the impact of the verdict on society in imposing sentences. A verdict that is too lenient can weaken the deterrent effect for the defendant and potentially reduce public trust in the justice system. And the government needs to provide special education and training to law enforcement officials in increasing more effective and efficient human resources in the field of technology, especially digital forensic experts who are adequate to accurately identify electronic evidence.

Keywords: Judge's Decision, Criminal Participation, CASN Test.